

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Metode Penelitian.....	9
1.5 Pertanggungjawaban Sistematika.....	10
BAB II LEMBAGA YANG BERWENANG MENYELESAIKAN	
 SENGKETA INFORMASI PUBLIK.....	12
2.1 Konsep Informasi Publik di Beberapa Negara	12
2.1.1 Peranan Sistem Informasi Publik di Australia	12
2.1.2 Peranan Sistem Informasi Publik di Malaysia dan Korea..	13
2.2 Landasan Yuridis Informasi Publik.....	15
2.3 Kewenangan Komisi Informasi Dalam Sengketa Informasi Publik	35
2.4 Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa	
Informasi Publik.....	49

BAB III PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK SESUAI	
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 JUNCTO	
UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 JUNCTO	
UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG	
PERADILAN TATA USAHA NEGARA	64
3.1 Kekuasaan Kehakiman.....	64
3.2 Sengketa Tata Usaha Negara.....	67
3.3 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	77
BAB IV PENUTUP	97
4.1 Kesimpulan.....	97
4.2 Saran.....	98
DAFTAR BACAAN.....	100
LAMPIRAN	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 beserta perubahannya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.